

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

**KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mojosari Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 3 Mei 2023

GAMAT MOJOSARI

Drs. MUJIB, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19650809 199312 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	21
2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	39
BAB V Penutup	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Mojosari merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Mojosari yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Mojosari adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Tahun 2022 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Mojosari yang berpedoman pada RKP Perubahan Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Revocusing Kecamatan Mojosari.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
31. SK tim penyusunan renstra Kec. Mojosari Nomor 188/ /416-308/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra 2021-2026 dan Renja 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Mojosari sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Mojosari ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang

perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah

berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Mojosari pada tahun 2022 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Realisasi belanja pada Kecamatan Mojosari Tahun 2022

OPD/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI S/D DESEMBER (Rp)	%
KECAMATAN MOJOSARI	14.875.361.000	12.765.526.533	85,82%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.295.331.000	5.559.585.533	88,31%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.270.000	96,93%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.129.000	95,05%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.209.031.000	4.527.866.623	86,92%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.800.000	46.020.000	98,33%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	11.912.000	99,27%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.990.000	99,97%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	7.397.000	92,46%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.915.000	97,17%
Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	39.338.000	98,35%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.000.000	20.770.000	98,90%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	495.000.000	462.960.000	93,53%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.000.000	39.833.400	84,75%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.000.000	129.301.210	95,07%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	45.960.000	91,92%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.500.000	134.978.300	98,89%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.945.000	99,45%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000	33.716.500	96,33%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.000.000	9.866.500	98,67%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25.000.000	23.850.000	95,40%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.952.815.000	3.280.417.000	82,99%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.502.815.000	2.860.198.400	81,65%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	450.000.000	420.218.600	93,38%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	302.200.000	288.837.000	95,58%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	92.200.000	89.217.000	96,76%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25.000.000	22.890.000	91,56%

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.000.000	43.210.000	96,02%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	140.000.000	133.520.000	95,37%

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Target Renja Perangkat Daerah (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	81%	78%	81%	78%	98%			

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	33 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan	100%			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	n/a	100%	n/a	n/a	100%			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	40 stel	40 stel	117 stel	117 stel	100%			
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang	40 stel	40 stel	117 stel	117 stel	100%			

	Kelengkapannya	dapat terpenuhi								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	100%	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan mebel (meja rapat dan kursi), Printer, CCTV dll.	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	100%	100 %	100 %	100 %	100 %			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	3 orang	n/a	3 orang	3 orang	3 orang			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit			

	Operasional atau lapangan									
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket			
7.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	81%	81%	81%	81%			
7.01.02.2.04		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%			

7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%	81%	81%	81%			
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975 pelayanan	975 pelayanan	975 pelayanan	975 pelayanan	975 pelayanan			
7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan			
		Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	960 pelayanan	960 pelayanan	960 pelayanan	960 pelayanan	960 pelayanan			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	81%	81%	81%	81%	81%			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi			

	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa								
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi				
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	n/a	n/a	n/a				
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	n/a	n/a	n/a				
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	n/a	n/a	n/a	n/a				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Mojosari

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai IKM Kecamatan
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja.

Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojosari
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			76	78	79	80	79,55		80	80	Baik
2	Nilai Reformasi Birokrasi			51	52	53	53	54		53	53	Baik
3	Presentase Peningkatan Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			4%	5%	6%	6%	3%		6%	6%	Baik
4	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti			82%	83%	84%	84%	86%		84%	84%	Baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Mojosari diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagaimana urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Mojosari

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Mojosari bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Mojosari yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Mojosari;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Mojosari namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Kecamatan Mojosari merupakan daerah rawan bencana.
2. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
3. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
4. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
5. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
6. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Insfrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
8. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Mojosari yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Mojosari untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2022-2024 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2024. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Mojosari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83%	7.103.819.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Mojosari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83%	7.103.819.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	16.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	16.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	2 Dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	2 Dokumen	8.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan kinerja yang dapat tersusun	2 Dokumen	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan kinerja yang dapat tersusun	2 Dokumen	8.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	5.786.819.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	5.786.819.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Mojosari	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	5.786.819.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Mojosari	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	5.786.819.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	IP ASN Perangkat Daerah	60	55.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	IP ASN Perangkat Daerah	60	55.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mojosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	55.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mojosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	55.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	681.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	681.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	75.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	75.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	180.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	180.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	123.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	123.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	185.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	185.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mojosari	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	85%	25.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mojosari	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	85%	25.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Mojosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 unit	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	270.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	270.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	270.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	270.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mojosari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mojosari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	120.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	120.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	50.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mojosari	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	40.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mojosari	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	40.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	25 Laporan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mojosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	25 Laporan	35.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	3.903.315.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	3.903.315.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mojosari	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	13 Kegiatan	3.903.315.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mojosari	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	13 Kegiatan	3.903.315.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	350.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	350.000.000	

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	350.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	450.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	450.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	Kec. Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	350.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	200.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Kec. Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	

	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan,	81%	309.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan,	81%	309.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	48.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	48.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	48.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	48.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	68.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	68.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	145.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	145.000.000	
	JUMLAH				10.697.819.000	JUMLAH				10.697.819.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Mojosari melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Mojosari secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	1 paket	Sapi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mojosari ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

Adapun tujuan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2026. Sasaran Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan;
2. Terwujudnya pelayanan public yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto pada 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public		IKM Kecamatan	81	83	84	85	85
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	65	66	67	68

3.2 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mojosari Tahun 2024 mengacu pada Tujuan Kecamatan Mojosari yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojosari untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**. Untuk itu

Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAN RENCANA MAJU TAHUN 2025	
			Loka si	Target Capian Kinerj a	Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	76	7.103.819.000	APBD	80	7.218.700.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		100%	16.000.000		100%	17.200.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	8.000.000		2 Dokumen	8.600.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	8.000.000		20 Laporan	8.600.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		100%	5.786.819.000		100%	5.902.500.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39 Orang/Bulan	5.786.819.000		39 Orang/Bulan	5.902.500.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		60	55.000.000		62	57.700.000
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		44 Orang	55.000.000		44 Orang	57.700.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		100%	681.000.000		100%	714.800.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	75.000.000		1 Paket	78.700.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	180.000.000		1 Paket	189.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	123.000.000		12 Paket	129.100.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	70.000.000		2 Paket	73.500.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2 Dokumen	3.000.000		2 Dokumen	3.100.000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang		2 paket	185.000.		2 paket	194.200.000

		Disediakan			000			
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	45.000.000		12 Laporan	47.200.000
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi		65%	25.000.000		65%	26.200.000
7.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	25.000.000		10 Unit	26.200.000
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	270.000.000		100%	274.500.000
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	90.000.000		12 Laporan	94.500.000
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	180.000.000		12 Laporan	180.000.000
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100%	270.000.000		100%	283.500.000
7.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8 Unit	100.000.000		8 Unit	105.000.000
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	120.000.000		8 Unit	126.000.000
7.01.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		14 Unit	50.000.000		14 Unit	52.500.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	35.000.000		100%	36.700.000
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		960 Pelayanan			960 Pelayanan	-
7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		25 Laporan	35.000.000		25 Laporan	36.700.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat		100%	3.250.000.000		100%	3.412.500.000
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		15 Kegiatan	3.250.000.000		15 Kegiatan	3.250.000.000
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	350.000.000		1 Unit	350.000.000

7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	350.000.000		1 Unit	350.000.000
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	450.000.000		1 Unit	450.000.000
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	350.000.000		1 Unit	350.000.000
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	350.000.000		1 Unit	350.000.000
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	300.000.000		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	300.000.000		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	200.000.000		5 Pokmas / Ormas	200.000.000
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	300.000.000		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	300.000.000		5 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	309.000.000		100%	324.400.000
7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		23 Dokumen	309.000.000		23 Dokumen	324.400.000
7.01.06. 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	48.000.000		8 Dokumen	50.400.000
7.01.06. 2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 Dokumen	48.000.000		5 Dokumen	50.400.000
7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen	68.000.000		5 Dokumen	71.400.000
7.01.06. 2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		5 Dokumen	145.000.000		5 Dokumen	152.200.000
JUMLAH					10.697.819.000		JUMLAH	10.992.300.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tahun 2023, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 416-308

NAMA SKPD : KECAMATAN MOJOSARI

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	PAGU (Rp)	KL	Rp.	D/TB/DAK
I	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		B		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	Kec Mojosari	7.076.819.000	-	-	-	-	-
1.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	Kec Mojosari	15.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kec Mojosari	7.500.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kec Mojosari	7.500.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	100%	Kec Mojosari	5.666.819.000	-	-	-	-	-

	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39 Orang/Bulan	Kec Mojosari	5.666.819.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		L	IP ASN Perangkat Daerah		60	Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		L	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		44 Orang	Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan		100%	Kec Mojosari	708.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		L	Jumlah Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan : lampu TL, saklar, stopkontak dll		1 Paket	Kec Mojosari	75.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer dll		1 Paket	Kec Mojosari	189.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor		12 Paket	Kec Mojosari	136.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy		2 Paket	Kec Mojosari	65.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		L	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		2 Dokumen	Kec Mojosari	3.000.000	-	-	-	-	-

	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		L	Jumlah jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll		2 paket	Kec Mojosari	190.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah		12 Laporan	Kec Mojosari	50.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		L	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi		100%	Kec Mojosari	41.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		L	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 unit	Kec Mojosari	41.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		100%	Kec Mojosari	241.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Laporan	Kec Mojosari	71.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan		12 Laporan	Kec Mojosari	170.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	Kec Mojosari	365.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang, dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan selama 12 bulan		8 Unit	Kec Mojosari	100.000.000	-	-	-	-	-

	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	Kec Mojosari	180.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		14 Unit	Kec Mojosari	85.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		L	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan			Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		L	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		960 Pelayanan	Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		L	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		25 Laporan	Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		L	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			Kec Mojosari	3.903.315.000	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		L	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		13 Kegiatan	Kec Mojosari	3.903.315.000	-	-	-	-	-

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	Kec Mojosari	580.663.000	-	-	-	-	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	Kec Mojosari	580.663.000					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	Kec Mojosari	580.663.000					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	Kec Mojosari	580.663.000					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	 Unit	Kec Mojosari	580.663.000					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari		L	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	Kec Mojosari	200.000.000					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo		L	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	Kec Mojosari	200.000.000					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman		L	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	Kec Mojosari	200.000.000					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo		L	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	Kec Mojosari	200.000.000					

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari		L	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	Kec Mojosari	200.000.000					
	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan		82%	Kec Mojosari	289.400.000	-	-	-	-	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		12 fasilitasi	Kec Mojosari	289.400.000	-	-	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		L	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	Kec Mojosari	50.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 Dokumen	Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-

	7.01.04.2.01.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertataman dan Ketertiban Umum		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	Kec Mojosari	54.400.000	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.03.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	Kec Mojosari	145.000.000	-	-	-	-	-
	JUMLAH							11.309.534.000					

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mojosari, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dilingkup Kecamatan Mojosari, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program dan sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri no 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Tahun 2024 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Mojosari, 3 Mei 2023



Drs. MUJIB, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650809 199312 1 001

